

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Proses globalisasi yang telah terjadi meningkatkan hubungan saling ketergantungan antar negara di dunia, bahkan menciptakan proses penyatuan ekonomi dunia. Hal ini menyebabkan batas-batas antar negara dalam berbagai kegiatan dunia usaha atau bisnis seakan hilang. Globalisasi dalam sektor ekonomi ditandai dengan semakin menipisnya batas-batas investasi atau pasar secara nasional/regional maupun internasional. Globalisasi pada perdagangan tidak hanya terjadi dalam perdagangan barang, tetapi terjadi pula dalam perdagangan jasa, sehingga salah satu annex dari UNWTO mengatur tentang perdagangan jasa. Perlunya pengaturan tersebut karena melihat keadaan saat ini dimana perkembangan jasa internasional meningkat dengan pesat.

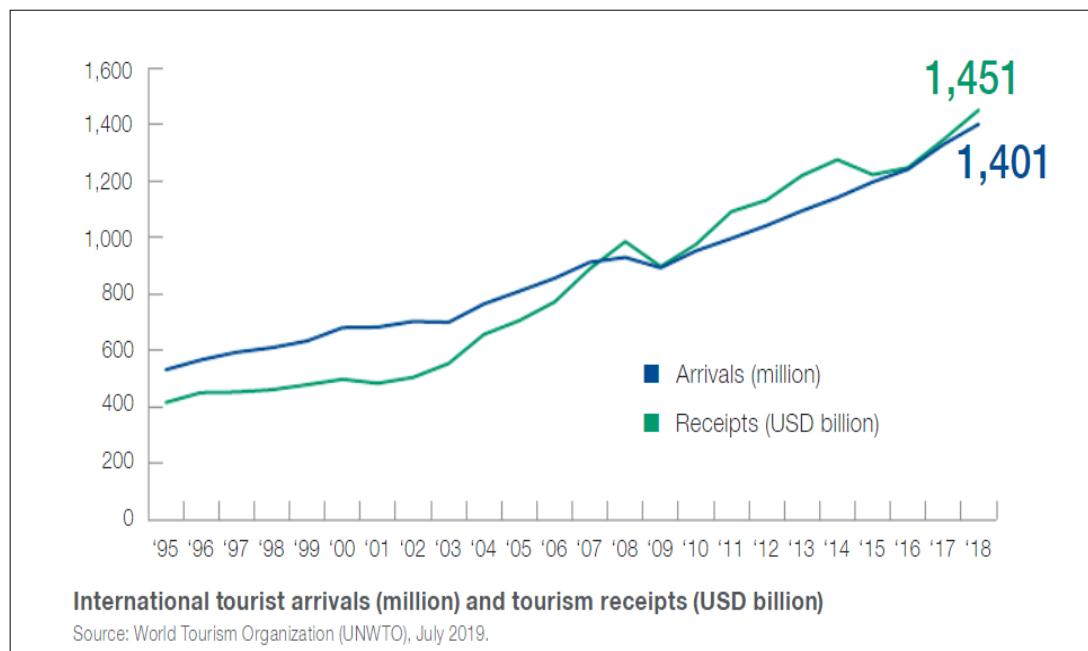
Perdagangan jasa salah satunya adalah pariwisata. Kemakmuran penduduk dunia yang semakin meningkat menjadikan perjalanan wisata sebagai kebutuhan utama bagi suatu kehidupan modern, hal ini didukung dengan terjadinya *Tree T Revolution*. *Tree T Revolution* ini terdiri dari yang pertama adalah *Transportation Technology*, dimana terdapat kemajuan dalam transportasi udara. Kedua *Telecommunication* yaitu adanya teknologi komputer digital yang menciptakan *One Touch System* yang dapat mempermudah manusia untuk memperoleh informasi dari seluruh penjuru dunia.

Tourism & Travel merupakan dampak dari adanya kemajuan dari transportasi dan telekomunikasi yang telah menciptakan mass tourism, dimana

orang-orang mulai melakukan perjalanan wisata dalam lingkup global (Yoety, 2008).

Pariwisata sendiri telah menjadi salah satu industri terbesar di dunia, dan merupakan andalan dalam menghasilkan devisa secara cepat di berbagai negara. Di beberapa negara misalnya Maladewa, Hawaii, Kepulauan Karibia sangat tergantung pada devisa yang di dapatkan dari kedatangan wisatawan. Bidang pariwisata ini meningkatkan GDP di negara-negara tersebut. Peran penting yang ada pada aspek pariwisata dalam perkembangan ekonomi di berbagai negara, pariwisata sering disebut sebagai *passport to development, new kind of sugar, tool for regional development, invisible export, non-pollution industry*, dan sebagainya (Pitana, I Gde; Gayatri, 2005).

Gambar 1.1
Map Kedatangan Wisatawan Internasional



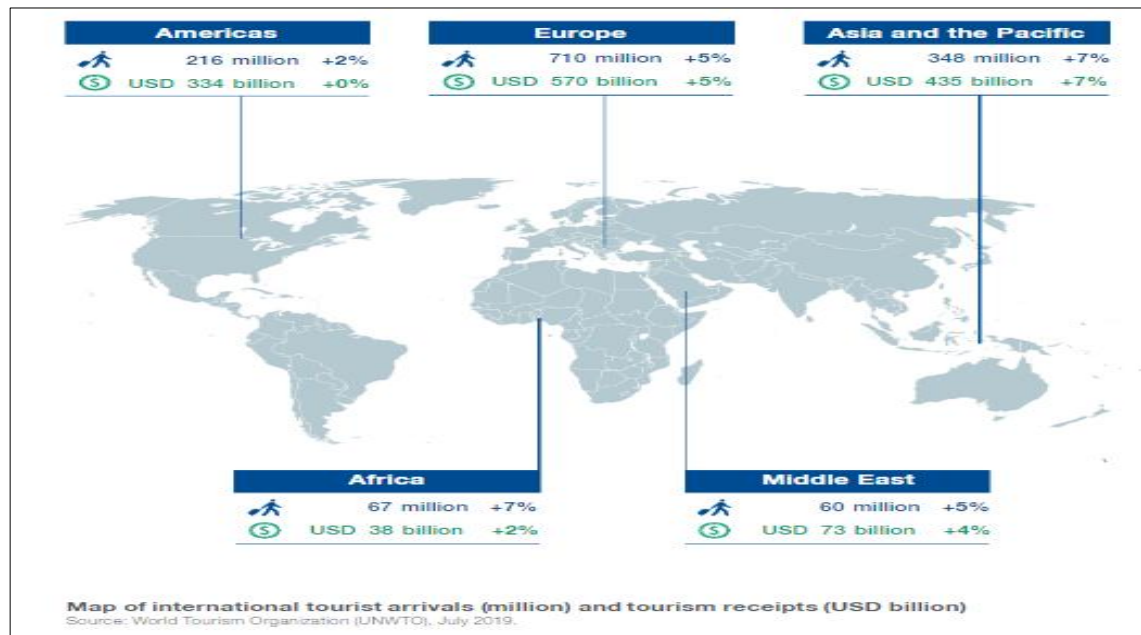
Sumber: (UNWTO, 2019)

Gambar 1.1 dapat kita lihat bahwa terdapat peningkatan kedatangan wisatawan dari seluruh dunia setiap tahunnya meningkat. Pada tahun 2018 terdapat 1,4 miliar pergerakan wisatawan internasional. Pada awalnya UNWTO pada 2010 memperkirakan 1,4 miliar kedatangan internasional tersebut akan dicapai pada tahun 2020, namun ternyata pertumbuhan tersebut dapat dicapai 2 tahun lebih awal dari perkiraannya. Peningkatan ini juga dibarengi dengan pendapatan dari adanya kedatangan wisatawan internasional yang juga ikut meningkat dan mendapatkan 1.4 triliun dollar pada tahun 2018.

Peningkatan jumlah wisatawan internasional ini sangat dipengaruhi oleh berkembang pesatnya teknologi saat ini. Perkembangan teknologi ini memberikan informasi tentang berbagai tempat di belahan dunia yang juga menjadi bentuk promosi dari berbagai negara agar negara mereka menjadi salah satu negara yang dikunjungi oleh wisatawan internasional. Perkembangan teknologi transportasi terutama transportasi udara juga mendorong masyarakat dunia untuk berpergian ketempat-tempat jauh yang belum pernah mereka kunjungi. Tingginya pertumbuhan ekonomi juga memudahkan pembuatan visa dan biaya transportasi udara yang terjangkau menjadi alasan kuat adanya pergerakan wisatawan ini.

Perkembangan pariwisata tujuan Afrika dan Timur Tengah tumbuh sangat pesat di atas rata-rata dunia, yaitu sebesar 7% ,di Timur Tengah 5%. Asia Pasifik tumbuh sebesar 7% dan Eropa tumbuh sebesar 5%, sedangkan turis ke Amerika tumbuh di bawah rata-rata dunia dengan peningkatan 2% (UNWTO, 2019). Hal ini dapat dibuktikan dengan persebaran map wisatawan internasional menurut UNWTO.

Gambar 1.2
Map Kedatangan Wisatawan Internasional



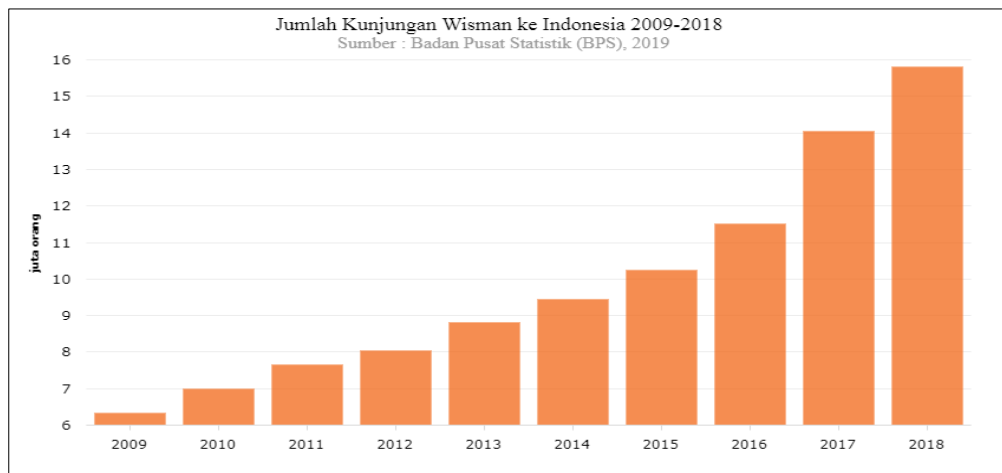
Sumber: (UNWTO, 2019)

Pada gambar 1.2 dapat kita lihat bahwa perkembangan pariwisata di dunia meningkat setiap tahunnya dan peningkatan ini pun juga membawa dampak baik bagi pertumbuhan devisa, dimana daerah yang mengalami pertumbuhan paling tinggi adalah daerah Asia Pasifik dengan peningkatan pengunjung sebesar 7% dan peningkatan devisa sebesar 7%.

Indonesia sendiri termasuk dalam kawasan Asia Tenggara yang juga berhasil meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke negaranya.

Gambar 1.3

Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Ke Indonesia



Sumber: (Widowati, 2019)

Pada gambar 1.3 ini dapat dilihat bahwa pertumbuhan pariwisata Indonesia pada taraf global ini menunjukkan peningkatan wisatawan mancanegara dari tahun ketahun. Pada tahun 2014-2018 pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesai mencapai 14 %. Angka ini lebih besar dibandingkan pertumbuhan kunjungan wisatawan mencanegara pada tahun 2009-2013 yaitu sebesar 9% pertahunnya. Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara sejalan dengan terus berkembangnya teknologi. Negara Indonesia sendiri sektor pariwisata ini memiliki peruntungan yang bagus, karena dapat kita ketahui alam Indonesia yang sangat beragam dan masih banyak daerah-daerah yang belum dikembangkan untuk pariwisata.

Pariwisata sangat erat kaitannya dengan *sustainable development goals* (SDGs), adanya kegiatan pariwisata ini akan membatu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pencapaian tujuan dari SDGs ini. pariwisata ini juga dapat menjadi dampak buruk dalam pencapaian SDGs jika tidak dikelola

dengan baik. Pengelolaan pariwisata yang baik akan mendorong tercapainya pemberantasan kemiskinan dan kelaparan, peningkatan pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan, mendorong munculnya inovasi dan industri lainnya yang menunjang pariwisata, mendorong adanya konsumsi dan produksi yang lebih bertanggungjawab, serta menunjang kesetaraan gender dimana dalam sektor pariwisata siapapun dapat bergabung jika memiliki kemampuan.

Peranan pariwisata dalam pembangunan ekonomi telah terpampang nyata, namun pariwisata bukan hanya menyangkut masalah ekonomi, pariwisata juga menyangkut masalah sosial budaya, politik dan seterusnya. Pariwisata adalah suatu sistem yang multikompleks, dimana terdapat berbagai aspek yang saling terhubung dan mempengaruhi. Dalam beberapa dekade terakhir, pariwisata merupakan sumber penggerak dinamika masyarakat dan dalam perubahan sosial-budaya (Pitana, I Gde; Gayatri, 2005).

Tabel 1.1
Jumlah devisa Sektor Pariwisata Tahun 2015-2018

Wilayah	Jumlah Devisa Sektor Pariwisata (Miliar US \$)			
	2015	2016	2017	2018
Indonesia	12.23	13.46	15.24	19.29

Sumber: (BPS, 2018)

Pada tabel 1.1 dapat dilihat bahwa jumlah devisa Indonesia dalam sektor pariwisata meningkat setiap tahunnya, bahkan dari tahun 2017 sebesar 15.24 miliar US dollar meningkat pesat ke 19.29 miliar US dollar pada tahun 2019. Meningkatnya devisa ini bukan hanya dapat membantu perekonomian Indonesia namun juga dapat memperkuat mata uang rupiah di mata dunia. Pariwisata dapat

dapat mendorong pembangunan, meningkatkan kesempatan kerja, penerimaan pajak, meningkatkan pendapatan nasional, serta memperkuat posisi neraca pembayaran.

Negara Indonesia menganut sistem desentralisasi yang telah diatur pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yang menjelaskan bahwa desentralisasi adalah terjadinya penyerahan kekuasaan pemerintah daerah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Sistem ini membawa dampak positif bagi pemerintahan daerah itu sendiri, dimana pemerintah daerah dapat memanfaatkan potensi apa saja yang dimiliki oleh daerah tersebut untuk memajukan dan mengembangkan daerahnya sehingga mereka dapat berdiri sendiri dan berhasil memenuhi kebutuhan masyarakatnya.

Sektor pariwisata saat ini menjadi prioritas bagi pembangunan Indonesia. Presiden Jokowi mengungkapkan pariwisata menjadi sektor prioritas yang akan dikembangkan pada tahun 2020. Beliau menyebutkan bahwa akan ada program 10 Bali baru dan juga 5 destinasi superior yang akan dikembangkan pada tahun 2020. Destinasi wisata di Jawa Tengah yang masuk di dalam program tersebut salah satunya adalah Candi Borobudur, sementara itu Jawa tengah sendiri menjadi target fokus pemerintah dengan peningkatan 10% total pengunjung (Paradiso, 2019). Kedatangan wisatawan mancanegara di Jawa Tengah pada 2019 juga meningkat sebesar 2,97 persen dari tahun sebelumnya.

Provinsi Jawa Tengah saat ini sedang gencar-gencarnya meningkatkan pariwisatanya salah satunya di Kabupaten Semarang. Kabupaten Semarang sendiri memiliki potensi yang besar dalam pembangunan destinasi pariwisata,

dapat dilihat dari segi geografisnya yang terdiri dari pegunungan yang berjajar-jajar yang menawarkan pemandangan yang indah di setiap sudutnya. Menurut data BPS, kunjungan wisatawan di Kab. Semarang meningkat setiap tahunnya dimana pada tahun 2015 meningkat sebesar 19,88% sedangkan pada tahun 2017 meningkat sebesar 24,85%.

Pemandangan yang menawan menjadikan banyak sekali destinasi wisata di Kabupaten Semarang yang menawarkan spot-spot pengambilan foto yang patut diperhitungkan, selain dari pemandangan yang menawan, masih banyak desa-desa di Kabupaten Semarang yang sebenarnya memiliki potensi yang besar untuk dijadikan desa wisata. Jawa Tengah memiliki 20 desa wisata yang masih aktif sampai dengan tahun 2019. Salah satu desa wisata yang memiliki daya tarik yang lebih di Kab. Semarang adalah Desa Wisata Kementul, Kec. Susukan. Desa ini menjadi salah satu desa yang mulai dikembangkan menjadi desa wisata sejak bulan Juni 2011 dari jumlah total 208 desa di Kab. Semarang. Desa Kementul sendiri sering disebut dengan desa seribu gazebo. Desa ini memiliki banyak potensi yang dapat diklasifikasikan menjadi 4 aspek (Bagus Sanjaya, 2018).

Aspek pertama adalah aksesibilitas dimana Desa Kementul sudah memiliki infrastruktur yang baik. Jalan menuju desa ini dapat dilalui oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4, namun rambu-rambu jalan yang menunjukkan jalan ke desa masih minim. Aspek kedua adalah atraksi dimana Desa Kementul memiliki berbagai daya tarik mulai dari wisata alam dan buatan dengan menawarkan pemandangan indah hamparan hijau sawah dan juga spot foto yang menarik serta gazebo-gazebo yang berderetan di pinggir-pinggir sawah. Sampai saat ini Desa Kementul telah memiliki 38 gazebo serta spot foto situs bintang jatuh dan rumah panggung

mitologi antaboga berbentuk kepala naga yang merupakan objek wisata khas dari desa ini. Wisata budaya dengan masih banyaknya upacara-upacara tradisi yang masih berjalan sampai saat ini mulai dari merti deso, dawuhan, uberkali dan sadranan serta masyarakat yang masih memegang teguh budaya dan etika jawa. Upacara adat yang menjadi ciri khas dari Desa Wisata Kemetul ini adalah upacara merti deso dan dawuhan. Upacara merti deso merupakan acara arak-arakan gazebo yang diisi oleh hasil bumi, setiap RT pasti membuat satu gazebo. Upacara merti deso ini juga diiringi oleh salah satu tarian khas desa ini yaitu Tari Jolenan yang ditarikan oleh anak-anak desa. Tari Jolenan ini memiliki arti dimana kita tidak boleh lupa kepada apa dan siapa yang telah memberikan kelimpahan hasil bumi, kemudian untuk penutup dari upacara merti deso ini adalah pertunjukan wayang kulit yang dilaksanakan sampai pagi menjelang.

Upacara dawuhan merupakan upacara meminta hujan, dimana ritual ini dilakukan di sendang dekat dengan pohon kanthil yang merupakan ikon dari Desa Kemetul ini, pohon kanthil ini diyakini bunganya akan terjatuh di Keraton Surakarta. Wisata selanjutnya adalah wisata religi, dimana terdapat makam sakral dari Nyai Ketul dan Kyai Ketul, beliau merupakan salah satu prajurit dari Keraton Surakarta yang bersembunyi di desa ini dan bertapa dibawah pohon kanthil dan akhirnya bertemu dengan Nyai Ketul. Makam sakral ini juga merupakan asal usul terciptanya Desa Kemetul ini. Wisata yang dikembangkan lainnya adalah wisata pertanian; wisata peternakan; dan *home industry* dengan menciptakan kerajinan-kerajinan tangan untuk oleh-oleh wisatawan dan wisata *adventure* yang terdiri dari *motor cross* dan *grass track*. *Home industry* yang ada di Desa Kemetul adalah produksi marning, Kerupuk Kenthir, roti pia, jamur tiram, jamu, dan Puli Kecer

Mbok Prenjak serta kerajinan khas dari desa ini adalah kerajinan dari bambu dan batok kelapa, kerajinan bambu biasanya kan dibentuk seperti rumah-rumah tradisional jawa dan kerajinan dari batok kelapa yang berbentuk seperti boneka kucing.

Aspek ketiga adalah amenities dimana desa ini telah dilengkapi berbagai sarana prasarana mulai dari air bersih, sumber listrik, sistem telekomunikasi, tempat parkir, kamar mandi, warung makan, ruang pertemuan, tempat sampah dan menyediakan 20 *homestay* dan 4 rumah *survival* serta bumi perkemahan. Desa Kemetul memiliki mata air sendiri yang juga digunakan sebagai pemandian umum dan untuk upacara uber kali. *Homestay* di Desa Wisata Kemetul ini memanfaatkan rumah-rumah warga, hal ini untuk menambah kesan pedesaan di Jawa.

Aspek yang terakhir yaitu kelembagaan dimana Desa Kemetul telah memiliki beberapa kelembagaan yang menunjang seperti Kelompok Sadar Wisata Sekar Kanthil, Lembaga Pemerintahan Desa, Pertahanan Sipil, dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga serta adanya Gapoktan (kelompok tani) dan paguyuban pedagang Desa Wisata Kemetul.

Pada tiga tahun terakhir ini jumlah pengunjung di Desa Wisata Kemetul kian menurun karena adanya pandemi virus corona ini dan berkurangnya pemasukan dari hasil desa wisata ini, berikut merupakan jumlah wisatawan yang mengunjungi Desa Wisata Kemetul:

Tabel 1.2
Jumlah Kunjungan Wisatawan Desa Wisata Kemetul

Tahun	Jumlah Pengunjung
2019	144.370 pengunjung
2020	9.361 pengunjung
2021	1.380 pengunjung

Sumber: Diolah pada tahun 2021

Berdasarkan Tabel 2.2 dapat dilihat bawasannya pengunjung Desa Wisata Kemetul ini setiap tahunnya mengalami penurunan, hal ini juga dilatarbelakangi dengan adanya penutupan desa wisata saat pandemi corona saat ini. paa tahun 2019 pengunjung desa wisata ini dapat tinggi dan setiap bulannya dapat karena didukung dengan objek wisata situs bintang jatuh dan rumah panggung mitologi antabiga yang berbentuk seperti kepala naga, namun di tahun selanjutnya karena adanya penutupan beberapa bulan dan belum berjalannya paket wisata menyebabkan kurangnya penghasilan dari desa wisata ini dan objek-objek wisata unggulan ini menjadi tidak terawat. Pada tahun 2020 sampai dengan 2021 Desa Wisata Kemetul hanya membuka wisata gazebo dan situs bintang jatuh. Desa Wisata Kemetul ini pada tahun 2021 telah mendapatkan bantuan 100 juta rupiah dari provinsi, bantuan inilah yang akan digunakan untuk pengembangan desa wisata ini.(Antaraneews, 2021)

Pengembangan desa wisata ini pemerintah menggunakan *collaborative governance*, dimana dalam pengembangan desa wisata melibatkan berbagai aktor mulai dari pemerintah sampai masyarakatnya sendiri. Pelaksanaan *collaborative governance* sampai saat ini masih mengalami beberapa kendala khususnya pada peran masing-masing *stakeholders* yang kurang maksimal.

Peran pemerintah dalam membantu promosi Desa Wisata Kemetul ini dengan memberikan sosialisasi kepada warga untuk membuat *web* dan media sosial, namun promosi yang dilakukan pemerintah di *web* Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang sangatlah kurang, dimana jika membuka *web* Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang mengenai Desa Wisata Kemetul hanya akan ada foto Desa Wisata Kemetul dan keterangan lokasi tanpa adanya keterangan lain yang dapat meningkatkan minat masyarakat untuk berkunjung.

Promosi yang dibuat oleh Desa Kemetul juga kurang menarik dan atraktif untuk wisatawan, meskipun sudah menggunakan media seperti *facebook*, *website* dan *blog* serta koran dan brosur. Kegiatan promosi menggunakan media online masih sangat kurang, dimana masyarakat belum bisa menjalankan *website* ataupun media sosial secara berkelanjutan. Desa Kemetul memiliki 2 *website* yaitu <https://kemetul.id/> dan <http://kemetul.susunan.semarangkab.go.id/> , namun keduanya sama-sama tidak memperbarui isi dari website tersebut secara berkelanjutan dan salah satu *website* sering kali sedang dalam masa perbaikan. Hal tersebut juga berlaku pada *facebook* Desa Kemetul, yang hanya memposting sesekali untuk mempromosikan desa wisata ini.

Masyarakat Desa Kemetul memang sudah banyak yang ikut dalam pengembangan desa wisata ini, namun dalam pelaksanaannya masih ada masyarakat yang belum terlibat. Masyarakat masih belum memahami kebutuhan akan pariwisata dan kesiapannya untuk menyambut wisatawan yang datang. (Bagus Sanjaya, 2018)

Promosi dan kesiapan sumber daya manusia yang masih kurang di Desa Kemetul menjadikan desa ini belum seterkenal desa-desa lainnya yang ada, bahkan masih banyak masyarakat Kabupaten Semarang yang tidak mengetahui adanya Desa Wisata Kemetul. Kurang terkenalnya Desa Wisata Kemetul ditakutkan akan diberhentikan program desa wisata ini, karena Kabupaten Semarang sendiri juga sebelumnya telah menutup 8 desa wisata yang kurang berkembang.

Berdasarkan fakta tersebut, peneliti tertarik untuk melihat lebih jauh mengenai pelaksanaan *collaborative governance* yang terjadi, termasuk peran dari masing-masing aktor didalamnya dengan mengadakan penelitian yang berjudul “*Collaborative Governance* dalam Pengembangan Desa Wisata Kemetul, Kecamatan Susukan, kabupaten Semarang”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana *collaborative governance* yang digunakan dalam pengembangan Desa Wisata Kemetul?
2. Bagaimana faktor keberhasilan *collaborative governance* dalam pengembangan Desa Wisata Kemetul?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis *collaborative governance* dalam pengembangan Desa Wisata Kemetul ini.
2. Menganalisis faktor keberhasilan *collaborative governance* dalam pengembangan Desa Wisata Kemetul.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan agar dapat diambil manfaat yang berguna dengan harapan antara lain sebagai berikut:

a. Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah pada kajian mengenai *collaborative governance* dalam pengembangan desa wisata. Penelitian mengenai pengembangan Desa Kemetul belum ada yang memfokuskan pada *collaborative governance*. Oleh karena itu penelitian ini diharapkan mampu menyediakan referensi baru mengenai konsep *collaborative governance* maupun pengembangan desa wisata.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat dalam lebih mengoptimalkan potensi besar yang dimiliki daerahnya untuk dikembangkan menjadi desa wisata. Adanya penelitian ini juga dapat memberikan informasi kepada pemerintah dalam membuat keputusan maupun kebijakan. Melalui penelitian ini juga diharapkan masyarakat dapat ikut

berpartisipasi dan membantu pemerintah dalam mengembangkan potensi pariwisata yang ada di daerahnya.

1.5 Kajian Teori

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu akan digunakan sebagai literatur penulis dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperbanyak teori untuk mengkaji penelitian yang dilakukan:

Table 1.3
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Metode dan Teori	Tujuan	Sumber	Hasil
1.	(La Ode Syaiful; Alwi; Haning, Tahir, Mohamad; Allorante, Irene, 2017)	<i>The Model of Collaborative Governance in Tourism Development at Buton District</i>	a. Pendekatan kualitatif b. Teori <i>collaborative governance</i>	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi model tata kelola <i>collaborative</i> dalam	<i>Internasional Journal of Academic Research and Reflection</i>	<i>Collaboration governance</i> di Kabupaten Buton ditentukan oleh peran para aktor. Aktor yang dimaksud disini adalah pemerintah/lembaga adat dan sektor swasta. Tata kelola kolaboratif di Kabupaten Buton

				<p>pengembangan pariwisata di Kabupaten Buton.</p>		<p>belum berjalan secara optimal karena keseimbangan peran dalam kolaborasi tidak terlalu terlihat, kurangnya peran sektor swasta dalam kolaborasi terkesan hanya sebagai pelengkap. Hubungan antar aktor belum terjalin dengan baik, sering terjadi kolaborasi antara para peserta ketidaksepakatan besar terutama para pemimpin adat sering terjebak masalah pamali. <i>Collaborative governance</i> yang disuarakan yaitu model yang menunjukkan ciri-ciri kekuatan kepemimpinan model fasilitatif (Facilitative Leadership). Kolaborasi juga berjalan dengan</p>
--	--	--	--	--	--	--

						aturan masyarakat adat.
2.	(Kirana & Artisa, 2020)	<i>Pengembangan Desa Wisata Berbasis Collaborative Governance di Kota Batu</i>	c. Pendekatan kualitatif d. Teori <i>collaborative governance</i>	Penelitian ini bertujuan untuk mengamati peran dari masing-masing aktor dan kerja sama yang telah memberntuk kolaborasi dalam pengembangan desa wisata.	Jurnal Administrasi Publik	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengembangan desa wisata, Pemerintah Kota Batu melibatkan beberapa aktor yaitu swasta, akademinsi, media dan mendorong masyarakat dengan adanya pemberdayaan. Pelaksanaan <i>collaborative governance</i> tersebut membutuhkan adanya komunikasi yang efektif antar aktor agar dapat mengoptimalkan perannya dalam pengembangan desa wisata.
3.	(Bagus	<i>Strategi</i>	a. Pendekatan	Penelitian ini	Jurnal Master	Desa Kemetul memiliki banyak

	Sanjaya, 2018)	<i>Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat di Desa Kemetul, Kabupaten Semarang</i>	kualitatif b. Teori desa wisata	bertujuan untuk mengetahui potensi pariwisata dengan melihat faktor pendukung dan penghambat di Desa Kemetul serta menganalisis strategi pariwisata berbasis masyarakat.	Pariwisata	pariwisata yang berpotensi menjadi objek wisata. Dibutuhkan adanya penguatan produk pariwisata unggulan, strategi pembangunan berkelanjutan, dan strategi pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia yang ada.
4.	(Harmawan, 2017)	<i>Collaborative Governance dalam Program Pengembangan Nilai Budaya Daerah Melalui Banyuwangi</i>	a. kualitatif b. Teori model <i>collaborative governance</i> Ansel and Gash	Mendeskripsikan tata kelola kolaboratif dalam program pengembangan nilai-nilai budaya lokal melalui	E-SOSPOL	Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah membahas bahwa Pemangku kepentingan yang terlibat dalam BEC dari 2011-2014 adalah Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Setempat Banyuwangi,

		<i>Etho Carnival</i>		Karnaval Etno Banyuwangi.		manajemen JFC, Dewan Seni Blambangan dan instruktur karnaval. Secara umum ada dua pola kerjasama dalam acara BEC yaitu pola kemitraan pemerintah swasta pada tahun 2011 dan pada tahun 2012 hingga 2014. Hambatan dalam membangun tata kelola kolaboratif terjadi pada faktor budaya dan kelembagaan.
5.	(Hakim, 2019)	<i>Collaborative Governance in Managing Educative Tourism of</i>	a. Pendekatan kualitatif b. Teori proses collaborative governance	Mengetahui peran masing-masing stakeholder dalam pelaksanaan collaborative	<i>Journal of Governance and Public Policy</i>	Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah bahwa Peran masing-masing pemangku kepentingan dalam pengelolaan tur edukasi eksotarium di

		<i>Yogya Exotarium in Sleman Regency</i>	Ansell and Gash	<i>governance</i>		Kabupaten Sleman adalah pemerintah sebagai kontrol atas manajemen pariwisata pendidikan, masyarakat sebagai karyawan dan sektor swasta sebagai manajer pariwisata. Terdapat 5 indikator yang digunakan untuk mengukur <i>collaboration governance</i> , diketahui bahwa pemerintah belum bisa ikut campur terlalu jauh dalam mengelola pariwisata.
6.	(Pujiyono, Kismartini, Yuwono, & Dwimawanti, 2019)	<i>Stakeholder Analysis on Tourism Collaborative Governance in Tanjung Lesung</i>	a. Pendekatan kualitatif b. Teori <i>stakeholders</i> dalam pengembangan	Menggambarkan dan menganalisis tata kelola kolaboratif yang melibatkan pemangku	African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure	Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah bahwa hubungan timbal balik antara berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan pariwisata yang optimal.

		<i>Tourism, Padeglang Regency, Banten Province, Indonesia</i>	pariwisata	kepentingan multi level dalam manajemen pariwisata.		Hubungan menjadi sangat kompleks karena masing-masing pemangku kepentingan memiliki kepentingan yang berbeda. Melalui kombinasi kekuatan, minat, dan pengaruh, ada sekelompok pemangku kepentingan yang menyebabkan kolaborasi menghasilkan ketidakseimbangan. Beberapa pemangku kepentingan mendominasi manajemen dan yang lainnya terbatas pada peran pendukung dan mungkin pasif. Kondisi ini menghambat komunikasi pemangku kepentingan dan koordinasi antar pemangku kepentingan
--	--	---	------------	--	--	---

						dalam berkolaborasi.
7.	(Mutiarawati & Sudarmo, 2017)	<i>Collaborative Governance dalam Penanganan Rob di Kelurahan Bandengan, Kota Pekalongan</i>	a. Pendekatan kualitatif b. Teori <i>collaborative governance</i> dan indikator keberhasilan <i>collaborative governance</i> Deseve	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kolaborasi yang terjadi antara para <i>stakeholders</i> dalam menyelesaikan masalah banjir pasang surut di Kelurahan Bandengan, serta untuk mengetahui faktor penghambat dalam kolaborasi tersebut.	Jurnal Wacana Publik	Hasil yang didapatkan adalah kolaborasi yang terjadi di Kelurahan Bandengan untuk mengatasi masalah pasang surut banjir ini tidak dilakukan secara maksimal, masih dibutuhkan sinergi dari <i>stakeholder</i> , pendekatan dengan masyarakat serta memperluas kerjasama dengan pihak lainnya untuk kebutuhan sumber daya.
8.	(Istayu	<i>Regional</i>	a. Pendekatan	Penelitian ini	LOGOS Journal	Hasil penelitian menunjukkan

	<p>Pratistaning Utami, Khrisno Hadi, 2019)</p>	<p><i>Government Strategies in The Development of Sumenep Keraton Tourism The Prespective Collaborative Governance</i></p>	<p>b. Teori pengembangan pariwisata, <i>collaborative governance</i> dan model <i>collaborative governance</i> Ansell and Gash</p>	<p>kualitatif bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengembangan wisata Keraton Sumenep dalam perspektif <i>collaborative governance</i></p>		<p>bahwa kolaborasi melibatkan Disparbudpora, agen perjalanan wisata dan kelompok seni klenengan. Hasil dari kolaborasi ini menunjukkan adanya peningkatan kunjungan wisatwan pada tahun 2016, namun hasil ini belum memperlihatkan peningkatan pada pendapatan daerah. Kolaborasi ini didukung dengan adanya forum dialog, kepercayaan dan komitmen antar aktor, namun tidak ada peraturan yang mendukung kolaborasi dan kurangnya partisipas dari para <i>stakeholders</i>.</p>
--	--	--	--	---	--	---

9.	(Brosot & Yogyakarta, 2016)	<i>Pelaksanaan Collaborative Governance di Desa Budaya Brosot, Galur, Kulonprogo, DI. Yogyakarta</i>	a. Pendekatan kualitatif b. Teori model <i>collaborative governance</i> Ansell dan Gash	Mengetahui pelaksanaan <i>collaborative</i> Desa Budaya Brosot dan faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan <i>collaborative governance</i> tersebut.	Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik	Hasil dari penelitian menunjukkan bawasannya kolaborasi yang terjadi di Desa Brosot hampir sama dengan model dari Ansell dan Gash, namun di desa ini ada pengaruh faktor budaya dalam keberjalanannya. Faktor budaya yang mempengaruhi adalah hubungan kekerabatan, arisan, jam karet, musyawarah mufakat, nggih ra kepanggih, ngaruhke, gotong royong dan swadaya, mokogi, ngombyongi dan mosobodao, paternalistik dan orangnya sekitarnya itu-itu saja.
10.	(Keyim, 2018)	<i>Tourism Collaborative</i>	a. Pendekatan kualitatif	Mengetahui potensi manfaat pariwisata	<i>Journal of Travel Research</i>	Hasil dari penelitian menunjukan bahwa masyarakat

		<i>Governance and Rural Community Developmen in Finland : The Case of Vounislahti</i>	b. Teori <i>collaborative governance</i>	bagi masyarakat pedesaan dipengaruhi oleh kebijakan dan praktik pembangunan pedesaan khususnya pendekatan tata kelola kolaboratif		tidak bisa menerima manfaat wisata dengan maksimal karena adanay kendala pada pengaturan sosial ekonom serta kelembagaan desa. Adanya perumusan pendekatan pariwisata dengan <i>collaborative governance</i> masyarakat yang adil dan efektif akan membawa dampak yang positif di Finlandia dan sekitarnya.
--	--	---	--	---	--	---

Sumber: Diolah pada tahun 2020

Pada table 1.3 ini kita dapat melihat bahwa dalam penelitian terdahulu, *collaborative governance* sudah diterapkan di dalam berbagai kegiatan pariwisata, termasuk di Indonesia. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian terdahulu pada table 1.3 adalah dimana *collaborative governance* ini sangat bermanfaat bukan hanya untuk pemerintah saja, namun juga bermanfaat terhadap masyarakatnya. Kolaborasi ini banyak dijumpai dalam membangun pariwisata yang berada di daerah-daerah misalnya dalam pengembangan desa wisata itu sendiri. *Collaborative governance* ini membutuhkan peran dari berbagai pihak bukan hanya dari pemerintah namun juga pihak non-pemerintah, seperti swasta, masyarakat, akademisi dan juga media. Beberapa penelitian yang dilakukan menyebutkan bahwa terdapat model *collaborative governance* yang terdiri atas beberapa tahap, yaitu; *starting condition*, kepemimpinan fasilitatif, *institutional design* dan *collaborative process*. Terdapat delapan item penting yang bisa dijadikan ukuran keberhasilan *collaborative governance* menurut DeSeve yaitu; *network structure*, *commitment to a common purpose*, *trust among the participants*, *governance access to authority*, *distributive accountability/responsibility*, *information sharing*, dan *access to resources*.

Pariwisata yang dibangun melalui *collaborative governance* ini sebagian besar bukan hanya mejembatani satu produk pariwisata, namun dalam pemngembangan pariwisata dengan *collaborative governance* ini menggabungkan berbagai jenis produk pariwisata yang di bungkus dengan desa wisata. Potensi-potensi yang ada dikembangkan dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi desa tersebut, dimana dalam pengembangannya ini dapat dilakukan pemberdayaan masyarakat. Permasalahan yang dialami dalam *collaborative governance* dalam

membangun pariwisata ini sebagian besar terletak pada koordinasinya antar aktor-aktor yang terlibat dalam *collaborative governance*.

Koordinasi pada kegiatan ini masih terdapat perbedaan kepentingan yang sulit untuk disatukan, selain itu kurangnya koordinasi, terdapat juga penyelewengan dari sumber daya finansialnya sendiri. Masih terdapat orang-orang yang tidak bertanggungjawab yang menggunakan uang untuk pengembangan pariwisata untuk kepentingan dirinya sendiri. Selain itu ada beberapa daerah yang kekurangan sumber daya finansial dan juga sumber daya manusia yang berkualitas dalam mengembangkan pariwisata ini. Permasalahan juga data dari masyarakatnya sendiri dimana masih terdapat masyarakat yang tidak mau berpartisipasi dalam mengembangkan desanya, kurang berkualitasnya manusia yang ada menyebabkan terhambatnya pengembangan pariwisata itu sendiri dan lama kelamaan pariwisata itu akan kurang diminati. Faktor budaya, kelembagaan dan juga peran dari pihak non pemerintah yang dinilai masih kurang juga masih menjadi kendala dalam melakukan kerja sama ini.

1.5.2 Administrasi Publik

Chandler & Plano (Keban, 2008) menjelaskan bawasannya administrasi publik merupakan seni dan ilmu untuk mengatur hubungan masyarakat serta melakukan tugas yang telah ditentukan. Administrasi publik sebagai ilmu yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah publik dengan melakukan perbaikan-perbaikan terutama pada organisasi, sumber daya manusia dan keuangan.

Felix A. Nigro dan L. Loyd G Nigro (Dwika, 2014) menjelaskan administrasi publik adalah suatu proses kerja sama kelompok dalam lingkungan

pemerintahan menyangkut eksekutif, legislatif dan hubungan keduanya yang memiliki peranan penting dalam merumuskan kebijakan pemerintah karena sebagian dari proses politik, kerja sama ini berkaitan dengan kelompok swasta dan perorangan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang dalam beberapa hal memiliki perbedaan pada penempatan pengertian dengan administrasi perorangan.

1.5.3 Ruang Lingkup Administrasi Publik

Cakupan administrasi publik sangat rumit tergantung pada perkembangan kebutuhan serta masalah yang dialami oleh masyarakat. Chandler dan Plano (Keban, 2008) menjelaskan bawasannya jika kehidupan manusia semakin rumit maka berdampak juga pada pekerjaan pemerintah atau administrasi publik. Dalam melihat cakupan administrasi publik ini dari suatu negara dengan melihat jenis-jenis lembaga dan non departemen yang ada.

Nicholas Henry (Keban, 2008), menjelaskan selain dari perkembangan ilmu administrasi itu sendiri, ruang lingkup administrasi publik dapat melihat dari:

1. Organisasi publik, pada prinsipnya berhubungan dengan model organisasi dan perilaku birokrasi.
2. Manajemen publik, yang berhubungan dengan sistem serta ilmu manajemen sumber daya manusia
3. Implementasi, yang berhubungan dengan pendekatan kebijakan publik serta implementasinya, privatisasi, administrasi antar pemerintah dan etika birokrasi.

1.5.4 Paradigma Administrasi Publik

A. Paradigma I (1990 - 1926)

Paradigma ini dikenal dengan dikotomi politik dan administrasi. Goodnow dalam tulisannya yang berjudul "*Politics and Administration*" mengatakan bahwa terdapat pemisah antara politik dan administrasi, dimana politik memfokuskan perhatiannya pada kebijakan atau kemauan masyarakat melalui badan legislatif. Sedangkan administrasi sendiri memfokuskan perhatiannya dalam pelaksanaan kebijakan melalui badan eksekutif. Paradigma ini menjelaskan bahwa ilmu administrasi negara memiliki fokus yang terbatas pada masalah-masalah organisasi, penyusunan anggaran pada birokrasi dan pemerintah serta masalah kepegawaian. Ilmu politik memiliki fokus pada masalah pemerintah, politik dan kebijakan. Lokus paradigma ini adalah masalah posisi yang seharusnya ditempati administrasi negara.

B. Paradigma II (1927 - 1937)

Paradigma ini disebut dengan paradigma prinsip-prinsip administrasi. Paradigma ini mementingkan fokusnya yaitu "prinsip-prinsip administrasi" yang dapat berlaku secara universal di setiap bentuk organisasi dan lingkungan sosial budaya. Lokus dari administrasi negara tidak menjadi masalah dalam paradigma ini. Gulick dan Urwick menjelaskan bahwa prinsip merupakan hal yang sangat penting bagi administrasi sebagai suatu ilmu. Prinsip administrasinya adalah POSDCORB.

C. Paradigma III (1950 - 1970)

Paradigma ini dikenal dengan paradigma administrasi negara sebagai ilmu politik. Terdapat beberapa kritikan tentang paradigma sebelumnya dimana

Morstein-Mark mempertanyakan pemisahan politik dan administrasi yang tidak mungkin terjadi. Helbert Simon menilai bahwa prinsip-prinsip tersebut tidak dapat berlaku secara universal. Oleh karena itu pada tingkatan ini terdapat usaha untuk menetapkan kembali hubungan konseptual antara administrasi negara dan ilmu politik. Paradigma ini memiliki birokrasi sebagai lokusnya, sementara fokusnya masih tidak jelas karena prinsip-prinsip administrasi publik yang masih memiliki banyak kelemahan.

D. Paradigma IV (1956 - 1970)

Paradigma ini dikenal sebagai administrasi publik sebagai ilmu administrasi. Pada paradigma ini prinsip-prinsip manajemen yang sebelumnya ada di paradigma I-III dikembangkan secara ilmiah dan mendalam. Paradigma ini hanya memberikan fokus namun tidak pada lokusnya. Fokus yang dimiliki ada pada perilaku organisasi, penerapan teknologi modern, analisis manajemen dan sistem, serta riset operasi. Perkembangan paradigma ini terbagi menjadi dua arah yaitu yang berorientasi ilmu administrasi yang murni didukung oleh disiplin psikologi, dan berorientasi pada kebijakan publik.

E. Paradigma V (1970 - 1990)

Paradigma ini dikenal dengan paradigma administrasi publik sebagai administrasi publik. Pada paradigma ini menunjukkan adanya perkembangan dari administrasi negara menjadi ilmu administrasi negara. Fokus yang dimiliki adalah pada teori organisasi dan manajemen serta kebijakan publik. Sedangkan untuk lokusnya pada masalah dan kepentingan publik.

F. Paradigma VI (1990-Sekarang)

Paradigma ini dikenal dengan paradigma *governance*. Konsep paradigma ini muncul pada akhir tahun 1990, *governance* menurut Tamagoya (Ikeanyibe, Eze Ori, & Okoye, 2017) dapat didefinisikan sebagai pelaksanaan kekuasaan atau otoritas oleh pemimpin politik untuk mencapai kesejahteraan rakyatnya, memiliki proses yang rumit dimana beberapa sektor dari masyarakat yang memiliki kekuasaan dan mengumumkan kebijakan publik, hal tersebut mempengaruhi manusia dan institusi.

Gibson menyebutkan bahwa pada dasarnya, *governance* melibatkan kemitraan dalam menjalankan fungsi pemerintahan, kemitraan ini termasuk penduduk lokal, organisasi yang melayani masyarakat/daerah, sektor publik dan sektor swasta (Ikeanyibe et al., 2017). Stoker (Ikeanyibe et al., 2017) menyebutkan terdapat 5 prinsip paradigma *governance*, yaitu:

1. Jaringan institusi dan aktor dari dalam dan di luar pemerintah
2. Kabur batas dan tanggungjawab untuk mengatasi masalah sosial dan ekonomi
3. Ketergantungan kekuasaan di antara institusi yang terlibat
4. Jaringan aktor pemerintah yang mandiri dan otonom
5. Dalam mengatasi dan menyelesaikan masalah tidak bergantung pada kekuatan pemerintah untuk menggunakan wewenangnya.

Dalam *governance* ini terdapat beberapa varian seperti *good governance*, *network governance* dan *collaborative governance*.

Berdasarkan 6 paradigma tersebut, penelitian ini termasuk didalam paradigma administrasi publik ke 6 yaitu *governance*. Dalam paradigma ini terdapat beberapa jenis *governance* yang salah satunya ada *collaborative governance*. Fokus administrasi publik dalam penelitian ini adalah *collaborative governance* dalam pengembangan desa wisata sementara lokusnya adalah di Desa Wisata Kementul, Susukan Kabupaten Semarang. Selain itu penelitian ini juga mengacu pada paradigma 5 yaitu Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik. Paradigma ini memiliki tiga fokus yaitu teori organisasi, teori manajemen publik dan teori kebijakan publik, sementara untuk penelitian ini terfokus pada aspek manajemen publik.

1.5.5 Manajemen Publik

Shafritz dan Russel (Keban, 2008) menjelaskan manajemen publik adalah usaha yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki tanggungjawab dalam mengelola organisasi dan sumberdaya yang ada untuk mencapai tujuan organisasi.

Overman (Keban, 2008), berpendapat bawasannya manajemen publik merupakan suatu studi antardisiplin yang yang berasal dari aspek umum organisasi dan penggabungan antara fungsi manajemen seperti planning, organizing dan controlling dengan sumber daya manusia, keuangan, fisik, informasi dan politik. Dalam administrasi publik terdapat dua bagian yaitu manajemen publik dan kebijakan publik. Jika digambarkan dalam sistem tubuh manusia, kebijakan publik merupakan sistem otak dan syaraf, sedangkan manajemen publik sebagai sistem jantung dan sirkulasi dalam tubuh manusia.

Manajemen publik disini dapat dikatakan sebagai proses menggerakkan sumber daya dan non sumber daya manusia sesuai perintah kebijakan publik.

Perkembangan zaman yang terus berjalan mengakibatkan paradigma manajemen publik mengalami pergeseran. Paradigma manajemen publik dimulai dengan paradigma *Old Publik Administration* atau dapat disebut OPA, kemudian berkembang menjadi paradigma *New Publik Management* atau dapat disebut dengan NPM dan lebih berkembang menjadi *New Publik Service*. NPS lahir karena adanya kritikan terhadap dua paradigma sebelumnya yang belum berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan justru menimbulkan ketidakadilan dalam memberikan pelayanan masyarakat. Semestinya masyarakat dapat dianggap sebagai warga negara bukan sebagai *client* seperti dalam paradigma OPA dan bukan sebagai customer seperti dalam paradigma NPM.

Pelayanan publik bukan hanya untuk memberikan respon terhadap permintaan pelanggan, namun bagaimana membangun hubungan yang baik, membangun kepercayaan serta membangun kolaborasi dengan rakyat. Perumusan kepentingan publik dapat dilakukan oleh semua aktor baik negara, swasta maupun masyarakat sipil. Berdasarkan pendapat tersebut menjadikan paradigma NPS juga disebut sebagai paradigma *governance*. Pada teori *governance* di era global ini melihat bawasannya tidak hanya sebuah negara atau pemerintahan yang dapat menyelenggarakan pelayanan publik secara efisien, ekonomis dan adil. Paradigma ini juga melihat betapa pentingnya kolaborasi (*collaboration*), kemitraan (*partnership*) dan jaringan (*networking*) yang terjadi diantara banyak *stakeholders* untuk menyelenggarakan pelayanan publik.

1.5.6 Collaborative Governance

Ansell dan Gash (Tilano & Suwitri, 2019) menjelaskan bahwa *collaborative governance* merupakan suatu kegiatan kerja sama untuk menentukan keputusan dengan tujuan menyelesaikan masalah publik yang dilakukan oleh beberapa lembaga publik dan pihak terkait lainnya baik terlibat secara langsung maupun tidak langsung.

Collaborative governance menurut Ansell dan Gash (Kirana & Artisa, 2020) juga merupakan suatu proses membentuk, menjalankan, mengoperasionalkan serta mengawasi pengaturan organisasi lintas sektoral untuk memecahkan dan menyelesaikan masalah kebijakan publik karena tidak bisa diselesaikan oleh satu organisasi.

Ada enam karakteristik *collaborative governance* menurut Ansell dan Gash (Febrian, 2016), antara lain :

- Pembentukan forum diprakarsai oleh lembaga publik maupun aktor-aktor dalam tersebut.
- Aktor non pemerintahan juga ikut bergabung dalam forum tersebut. .
- Semua peserta dapat ikut berpartisipasi dalam pembuatan dan pengambilan keputusan.
- Pelaksanaan forum terorganisir secara formal dan bersama sama.
- Forum yang dilaksanakan bertujuan untuk menentukan keputusan secara bersama-sama atau berorientasi pada konsensus.
- Kolaborasi memusatkan perhatiannya bukan hanya kepada kebijakan publik namun juga pada manajemen publik.

Ansell dan Gash (Tilano & Suwitri, 2019) menjelaskan tentang model *collaboration governance* yang memiliki 4 variabel:

1. Starting Condition

Starting condition merupakan tahapan awal dalam membentuk relasi, dimana masing-masing aktor yang memiliki perbedaan kepentingan dan tujuan memutuskan berkolaborasi untuk mencapai visi serta tujuan bersama. Tahapan ini juga dipengaruhi oleh adanya sejarah kerja sama atau konflik yang dapat mendukung atau menghambat kolaborasi dan ketidakseimbangan kekuatan sumberdaya, kekuatan atau pengetahuan.

2. Kepemimpinan fasilitatif

Kepemimpinan fasilitatif merupakan faktor penting dalam *collaborative governance*, dimana berkaitan dengan bagaimana membawa *stakeholders* kedalam sebuah forum untuk memutuskan suatu konsensus berkaitan dengan penetapan aturan yang jelas, membangun kepercayaan, pembagian keuntungan bersama serta pemberdayaan.

3. Desain institusional

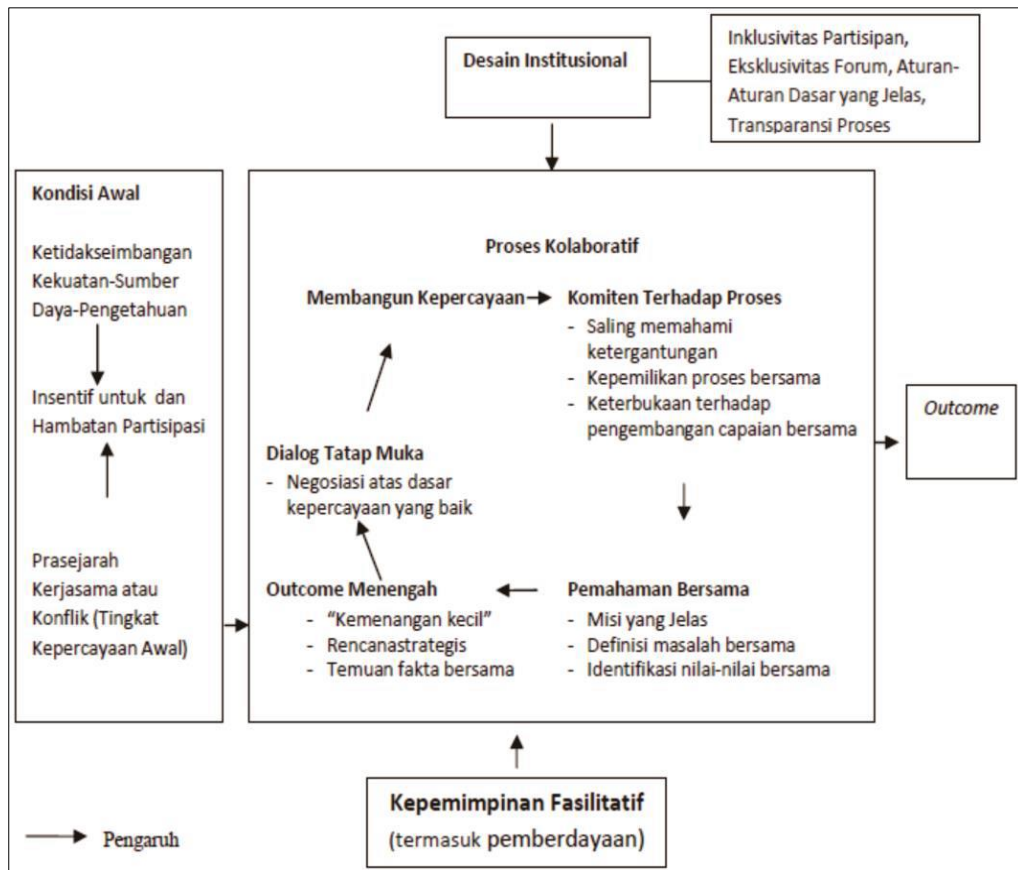
Desain institusional yang berhubungan dengan peraturan dasar yang ada dalam kolaborasi yang telah disepakati bersama tidak hanya oleh satu pihak untuk dijalankan. Kolaborasi akan berhasil jika semua partisipan terkena dampak dan saling peduli terhadap permasalahan yang ada. Berkaitan dengan transparansi, dimana *stakeholders* yakin bahwa proses ini adil, merata dan terbuka.

4. Proses kolaborasi

Prose kolaborasi ini memiliki beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut:

- a) Dialog tatap muka
- b) Membangun kepercayaan
- c) Komitmen terhadap proses
- d) Share understanding
- e) Hasil sementara

Gambar 1.4
Model Collaborative Governance Ansell and Gash



Sumber: Ansell and Gash dalam (Tilano & Suwitri, 2019)

Pada gambar 1.4 dapat dilihat tahapan dari model *collaborative governance* Ansell and Gash. Model ini terdiri dari kondisi awal, kepemimpinan fasilitatif, desain institusional dan proses kolaboratif.

1.5.7 Keberhasilan *Collaborative Governance*

DeSeve (Mutiarawati & Sudarmo, 2017) menjelaskan bawasannya untuk mencapai suatu keberhasilan dalam *collaborative governance* terdapat delapan indikator untuk menentukannya, delapan indikatornya adalah sebagai berikut:

1. *Networked structure* (struktur jaringan)

Struktur jaringan ini menjelaskan adanya keterkaitan antara masing-masing elemen yang saling menyatu bersama untuk mendiskripsikan unsur-unsur fisik dari jaringan yang ada. Terdapat tiga bentuk struktur jaringan menurut Milward dan Provan, yaitu:

a) *Self Governance*

Pada model ini tidak memiliki entitas administratif, walaupun begitu semua stakeholders ikut berpartisipasi dalam jaringan dan manajemen. Kelebihan model ini yaitu dimana semua stakeholders ikut berpartisipasi dengan aktif dan berkomitmen penuh, namun karena itu dalam memutuskan suatu keputusan sulit untuk mencapai konsensus.

b) *Lead Organization*

Pada model ini telah memiliki entitas administratif serta memiliki manajer yang melakukan jaringan, di dalamnya juga terdapat anggota atau penyedia layanan. Kelebihan dari model ini dimana prosesnya dapat berjalan secara efisien dan memiliki arah yang jelas, namun

kelemahannya adalah adanya dominasi dari *lead organization* dan kurang kuatnya komitmen dari anggota. Pada model ini juga jaringan yang dibentuk tidak boleh hierarkis

c) *Network Administrative Organization (NAO)*

Pada model ini memiliki entitas administrasi yang tegas untuk mengelola jaringan yang ada, namun bukan sebagai penyedia layanan dan manajernya diberikan gaji.

2. Commitment to a common purpose (komitmen terhadap tujuan)

Indikator ini mengacu pada alasan kolaborasi ini dapat terbentuk, hal ini karena adanya perhatian dan komitmen untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan.

3. *Trust among the participants* (adanya saling percaya diantara pelaku/peserta)

Kepercayaan sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan proses kolaborasi, selain itu para stakeholder juga dapat mempercayakan informasi-informasinya untuk pencapaian tujuan bersama.

4. *Governance* (kejelasan dalam tata kelola)

Indikator ini menjelaskan tentang kejelasan dalam tata kelola yang meliputi empat hal, yaitu:

a) *Boundary dan exclusivity.*

Menjelaskan dan mempertegas bawasannya siapa saja yang termasuk ke dalam anggota dan siapa saja yang tidak termasuk anggota dalam kolaborasi ini.

b) *Rules* (aturan-aturan).

Hal ini menjelaskan bahwa terdapat beberapa pembatasan perilaku anggota, jika menyimpang terhadap aturan tersebut maka anggota dapat dikeluarkan. Aturan ini membahas apa yang seharusnya dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan.

c) *Self determination*.

Hal ini menjelaskan bawasannya terdapat kebebasan untuk menentukan cara bagaimana kolaborasi ini akan berjalan dan siapa saja yang dapat menjalankannya.

d) *Network management*.

Hal ini menjelaskan tentang resolusi penolakan/tantangan, alokasi sumberdaya, kontrol kualitas, dan pemeliharaan organisasi. Selain itu juga menjelaskan adanya sumber daya manusia yang berkualitas dan memenuhi persyaratan serta memiliki sumber daya keuangan yang memadai.

5. *Access to authority* (akses terhadap kekuasaan)

Pada kegiatan kolaborasi ini terdapat standar atau ukuran-ukuran ketentuan prosedur pelaksanaan yang jelas dan telah disepakati bersama dan diterima secara luas.

6. *Distributive accountability/responsibility*

Pembagian dan pengelolaan manajemen secara bersama-sama serta adanya pembuatan keputusan yang telah disepakati bersama dengan kata lain berbagi tanggung jawab untuk mencapai hasil dan tujuan bersama.

7. *Information sharing* (bagi informasi)

Kemudahan akses informasi bagi para anggota dan adanya perlindungan kepada identitas pribadi seseorang serta adanya keterbatasan akses bagi yang bukan anggota kecuali ada persetujuan dari semua pihak.

8. *Access to resources* (akses sumber daya)

Ketersediaan sumber daya baik dalam bentuk keuangan, teknis, manusia maupun sumber daya alam yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan bersama.

1.5.8 Pariwisata

Salah satu contoh dari penerapan *collaboration governance* sendiri ialah dalam sektor pariwisata. Sedarmayanti (Kirana & Artisa, 2020) mengungkapkan bawasannya kepariwisataan Indonesia adalah pariwisata yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, dalam mengembangkan pembangunan kepariwisataan ini pemerintah, dunia usaha atau industri, masyarakat (termasuk tokoh masyarakat, agama, pers, LSM dan akademisi) sebagai pelaku utamanya. Hal ini sejalan dengan pelaksanaan *collaborative governance* yang memerlukan berbagai pihak, bukan hanya pemerintahan dalam menangani urusan publik.

Pariwisata menurut Spillane (Luterlean, 2019) adalah perjalanan yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok dari suatu tempat ke tempat yang lainnya untuk mencari keseimbangan dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu. Pendit (Setiawan & Saefulloh, 2019) menjelaskan bawasannya pariwisata merupakan suatu kegiatan dimana seseorang atau lebih pergi dari tempat tinggalnya menuju tempat lainnya. ada beberapa faktor pendorong yang menyebabkan kepergiannya, yaitu bisa karena

kepentingan ekonomi, sosial, kebudayaan, politik agama, kesehatan maupun kepentingan lain seperti hanya sekedar keingin tahuan ataupun menambah pengalaman.

1.5.9 Jenis Pariwisata

Jenis wisata menurut James J. Spillane (M & Santosa, 2013) dapat ditentukan menurut motif dari tujuan perjalanan tersebut, hal ini dibedakan menjadi beberapa jenis pariwisata khusus, yaitu:

a. Pariwisata untuk Menikmati Perjalanan (*Pleasure Tourism*)

Pariwisata jenis ini dilakukan oleh orang-orang yang ingin berlibur ketempat lain untuk mencari udara segar, memenuhi keingintahunya, merilekskan sarafnya, menikmati keindahan alam maupun untuk mendapatkan kedamaian.

b. Pariwisata untuk Rekreasi (*Recreation Tourism*)

Pariwisata jenis ini dilakukan oleh orang-orang yang memanfaatkan hari liburnya untuk beristirahat, untuk mengembalikan kesegaran jasmani dan rohani.

c. Pariwisata untuk Kebudayaan (*Cultural Tourism*)

Pariwisata jenis ini dilakukan oleh orang-orang yang ingin mempelajari kebudayaan suatu daerah seperti adat istiadatnya, kelebagaannya dan cara hidup mereka. Selain itu mereka juga menginginkan untuk mengunjungi tempat-tempat bersejarah, pusat kesenian dan mengikuti festival budaya ataupun pusat keagamaan.

d. Pariwisata untuk Olahraga (*Sports Tourism*)

Pariwisata jenis ini telah dibagi dalam dua kategori, yaitu:

- 1) *Big Sports Event*, yaitu pariwisata yang dilakukan oleh orang-orang untuk menghadiri acara olahraga besar seperti Olympiade Games, World Cup, dan lain-lain.
 - 2) *Sporting Tourism of the Practitioner*, yaitu pariwisata yang dilakukan oleh orang-orang yang ingin berlatih maupun untuk mempraktekan olahraga seperti pendakian gunung, olahraga naik kuda, dan lain-lain.
- e. Pariwisata untuk Urusan Usaha Dagang (*Business Tourism*)
- Pariwisata jenis ini dilakukan oleh orang-orang yang memiliki tugas pekerjaan.
- f. Pariwisata untuk Berkonvensi (*Convention Tourism*)
- Pariwisata jenis ini dilakukan oleh orang-orang yang ingin menghadiri sebuah konvensi yang telah dihadiri oleh banyak peserta yang rata-rata biasanya tinggal sejenak di negara penyelenggara.

1.5.10 Pengembangan Pariwisata

Pengembangan pariwisata menurut Barreto dan Giantari (Alhamdi, 2017) adalah suatu usaha untuk mamajukan sebuah objek wisata agar dapat menarik minat wisatawan, manarik dalam segi tempat maupun semuan benda yang ada ditempat tersebut. Adanya pengembangan ini berkaitan erat dengan adanya pembangunan perekonomian daerah atau negara tersebut.

Yoeti (Rustiyani, 2018) menyebutkan bahwa terdapat tiga syarat agar suatu tujuan wisata dapat dipertimbangkan untuk dikunjungi, yaitu:

1. Daerah tersebut harus mempunyai “*something to see*” dimana daerah memiliki objek wisata dan atraksi wisata berbeda dengan daerah lain.
2. Daerah tersebut harus mempunyai banyak hal “*something to do*” dimana daerah itu memiliki fasilitas rekreasi atau taman bermain yang dapat dinikmati.
3. Daerah tersebut harus tersedia dengan “*something to buy*”, dimana daerah tersebut memiliki souvenir atau kerajinan khas yang dapat dijadikan sebagai oleh-oleh, selain itu juga harus memiliki sarana dan prasarana yang lengkap untuk kebutuhan umum.

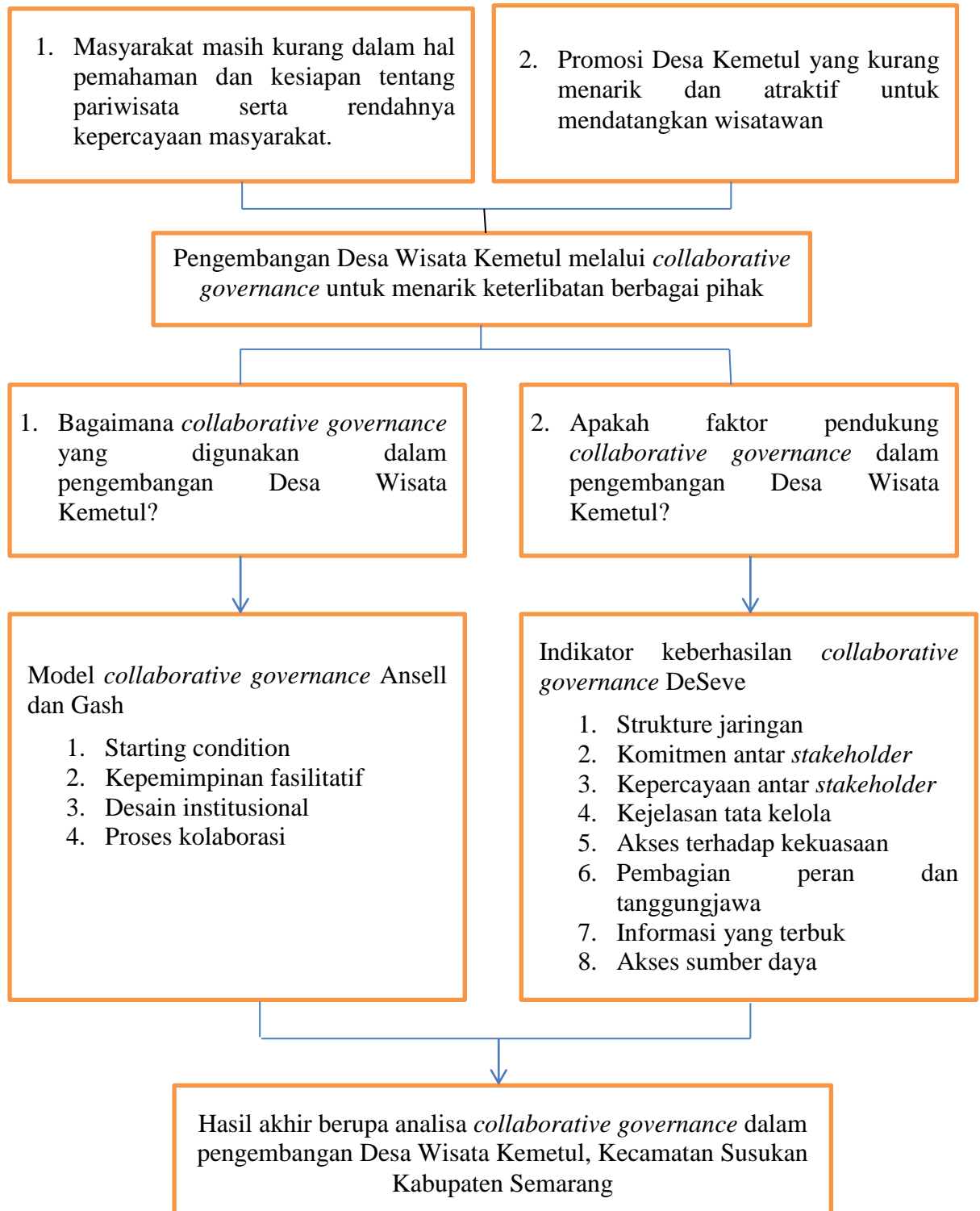
1.5.11 Desa Wisata

Desa merupakan salah satu daerah yang saat ini memiliki daya tarik khusus di era modern, dimana daerah ini sebagian besar masih terjaga dari hiruk pikuk kota. Damanik (Andayani, Martono, & Muhamad, 2017) menyebutkan bahwa dalam pengembangan pariwisata pedesaan ini didorong oleh tiga faktor, yang pertama wilayah pedesaan ini masih memiliki potensi alam dan budaya yang masih asli, masyarakat masih menjalankan tradisi dan ritual budaya yang didukung oleh tempatnya. Kedua, lingkungan wilayah pedesaan yang masih asri dan belum tercemar polusi seperti di perkotaan. Ketiga, perkembangan perekonomian di desa yang masih lambat sehingga dibutuhkan pemanfaatan potensi ekonomi, sosial dan budaya yang ada di masyarakat lokal.

Pengembangan kawasan pedesaan ini merupakan pilihan tepat untuk dijadikan sebagai desa wisata. Desa wisata sendiri merupakan suatu kawasan pedesaan yang menawarkan keaslian daerah pedesaan baik dari kehidupan sosial ekonomi, sosial budaya, adat istiadat, kehidupan sehari-hari, memiliki bentuk

bangunan dan tata ruang desa yang khas, memiliki kegiatan ekonomi yang menarik, serta memiliki potensi untuk dikembangkan (Hadiwijoyo, 2012).

1.6 Kerangka Pemikiran



1.7 Operasionalisasi Konsep

Pada penelitian ini menggunakan dasar pemikiran konsep *collaborative governance*. *Collaborative governance* adalah suatu usaha pemerintah dalam pengambilan keputusan untuk menangani masalah publik yang semakin kompleks dimana pemerintah perlu melakukan kerja sama dengan masyarakat dan aktor non publik. Hal ini didasarkan pada fenomena yang akan diteliti yaitu berkaitan dengan *collaborative governance* dalam pengembangan Desa Wisata Kemetul, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang. Dalam menganalisis fenomena *collaborative governance* ini, maka akan diteliti lebih lanjut menggunakan model *collaborative governance* Ansell and Gash, yaitu:

1. *Starting Condition*

- a. Proses pembentukan relasi yang terjalin antara pemerintah daerah dengan *stakeholders* non-publik berkaitan dengan kolaborasi pengembangan Desa Wisata Kemetul.
- b. Pembentukan visi bersama
- c. Ketergantungan antar *stakeholder*

2. Kepemimpinan Fasilitatif

- a. Proses musyawarah dalam pelaksanaan dialog antar pemerintah dan *stakeholder*
- b. Manajemen dalam proses kolaborasi
- c. Membangun kepercayaan
- d. Pembagian keuntungan bersama

3. Desain Institusional

- a. Tingkat kejelasan peraturan

- b. Pembentukan SOP dalam pelaksanaan kerja sama
- c. Keterbukaan dalam proses kerja sama

4. Proses Kolaborasi

Dalam proses kolaborasi ini terdapat 4 tahapan yaitu:

Operasionalisasi proses kolaborasi adalah:

- a. Dialog tatap muka antar *stakeholders*
 - Adanya musyawarah antar stakeholders mengenai kegiatan kolaborasi tersebut
- b. Membangun kepercayaan
 - Adanya keterbukaan dalam setiap proses kolaborasi untuk meningkatkan kepercayaan antar stakeholders
- c. Komitmen terhadap proses
 - Adanya tujuan yang sama antar stakeholders
 - Adanya sikap memiliki proses kolaborasi bersama
- d. Share understanding
 - Kejelasan visi dan misi dalam kolaborasi
 - Pembentukan nilai-nilai bersama
- e. Hasil sementara
 - Pembentukan rencana strategis

Sedangkan untuk mengetahui faktor pendukung *collaborative governance* dalam pengembangan Desa Wisata Kemetul ini akan diteliti lebih lanjut dengan melihat indikator keberhasilan dalam *collaborative governance*, yaitu:

1. Struktur Jaringan
 - a. Proses pembentukan struktur jaringan
 - b. Pembentukan peran
2. Komitmen *Stakeholders* Terhadap Tujuan Bersama
 - a. Faktor pendorong terbentuknya *collaborative governance*
 - b. Tingkat komitmen *antar stakeholder*
 - c. Kejelasan tujuan
3. Kepercayaan Antar *Stakeholders*
 - a. Tingkat kepercayaan antar *stakeholder*
4. Kejelasan Tata Kelola
 - a. Pembentukan anggota
 - b. Kejelasan aturan dengan sanksi yang ditetapkan
 - c. Cara menjalankan kolaborasi
 - d. Pengalokasian sumber daya
 - e. Cara pemeliharaan organisasi
5. Akses Terhadap Kekuasaan
 - a. Kejelasan standar ukuran dan ketentuan dalam SOP yang telah dibuat
6. Pembagian Peran dan Tanggung Jawab
 - a. Kejelasan peran *stakeholder* dalam *collaborative governance*
 - b. Kejelasan tanggungjawab yang diemban para *stakeholder*
7. Informasi yang Terbuka
 - a. Keterbukaan dan kemudahan dalam mendapatkan informasi antar *stakeholder*
 - b. Tingkat keamanan informasi

8. Akses Sumber Daya

- a. Ketersediaan sumber daya manusia
- b. Ketersediaan sumber daya keuangan
- c. Ketersediaan sumber daya teknis
- d. Ketersediaan sarana dan prasarana

1.8 Argumen Penelitian

Pada penelitian mengenai *collaborative governance* dalam pengembangan Desa Wisata Kemetul ini dilatar belakangi dimana masyarakat desa yang masih kurang dalam pemahaman dan kesiapan dalam hal pariwisata serta rendahnya kepedulian masyarakat. hal lain yang menyebabkan desa ini kurang dikenal adalah karena promosi yang dilakukan masih kurang atraktif. Oleh karena itu terdapat dua rumusan masalah yaitu bagaimana *collaborative governance* dalam pengembangan Desa Wisata Kemetul dan apakah faktor keberhasilan yang mempengaruhinya. Hal tersebut dibahas dengan model *collaborative governance* dari Ansell dan Gash (2017) dan indikator keberhasilan dari DeSeve. Penulis berargumen bahwa masalah tersebut ada dikarenakan kurang berjalan dengan maksimal sistem yang ada dalam kolaborasi tersebut serta masih kurangnya komitmen dari masing-masing pihak yang terlibat. Kedua hal itulah yang menyebabkan Desa Wisata Kemetul ini kurang berkembang dan tidak dikenal oleh banyak orang walaupun sudah berdiri hampir 10 tahun.

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode ini digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami sesuatu yang berasal dari masalah sosial, penelitian ini juga mengamati manusia dan interaksi yang terjadi dengan orang lain maupun dengan lingkungannya, memperoleh pendapat dan pengalaman mereka untuk dijadikan informasi yang diperlukan oleh peneliti.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan membuat gambaran dan meneliti laporan yang didapat dari pendapat responden dan melakukan studi pada keadaan yang dialami, hal ini bertujuan untuk menggambarkan permasalahan yang ada di lapangan. Desain penelitian ini digunakan dan dipilih peneliti untuk mengetahui fenomena yang berkaitan dengan *collaborative governance* dalam pengembangan Desa Wisata Kemetul.

1.9.2 Situs Penelitian

Situs penelitian adalah lokasi atau tempat penelitian itu dilakukan. Informasi mengenai data yang diperlukan untuk penelitian dapat ditemukan di situs penelitian (Wiratna Sujarwene, 2014). Situs penelitian ini adalah di Desa Wisata Kemetul, Susukan Kabupaten Semarang.

1.9.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan individu ataupun kelompok sebagai informan yang dapat memberikan informasi terkait dengan fenomena yang akan

diteliti. Pada penelitian ini akan menggunakan teknik *purposive* untuk memilih informan yang tepat. *Purposive sampling* (Sugiono, 2014) adalah pengambilan sampel sumber data dengan adanya pertimbangan tertentu. Subjek dari penelitian ini adalah pihak-pihak yang ikut ambil andil dalam *collaborative governance* dalam pengembangan Desa Wisata Kemetul.

1.9.4 Jenis Data

Menurut Wiratna Sujarweni (Sugiono, 2014), jenis data dalam penelitian dapat dibagi menjadi dua yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Pada penelitian ini peneliti menggunakan data kualitatif. Data kualitatif sendiri dapat berupa kata atau kalimat yang dapat didesinisikan. Selain itu terdapat data-data tambahan seperti dokumen, foto dan lain-lain.

1.9.5 Sumber Data

a) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti bersumber langsung dari informan. Data ini diperoleh dari hasil wawancara dengan informan. Sumber data primer dari penelitian ini, yaitu:

1. Kepala Desa Kemetul
2. Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang
3. Masyarakat sekitar
4. Kelompok Sadar Wisata Desa Kemetul
5. Ketua Karang Taruna

b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti bersumber pada data yang tidak langsung. Data sekunder dari penelitian ini didapatkan dari:

1. Dokumen-dokumen terkait dari pengembangan desa wisata
2. Perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

1.9.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi. Teknik ini mengumpulkan data yang berbeda-beda dengan tujuan mendapat data dari sumber yang sama. Terdapat beberapa teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data, yaitu observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber. Tujuan dari teknik ini adalah untuk peningkatan pemahaman peneliti terhadap data yang ditemukannya.

Pada penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan turun kelapangan yaitu ke Desa Wisata Kemetul, Susukan Kabupaten Semarang untuk mengumpulkan data tentang *collaborative governance*.

1.9.7 Analisis Interpretasi Data

Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis interaktif. Menurut Miles dan Huberman (Sugiono, 2014), analisis data kualitatif yang dilakukan secara interaktif dan terus menerus sampai tuntas.

Terdapat tiga hal utama dalam kegiatan analisis interpretasi data ini yaitu:

1. Reduksi data

Kegiatan mereduksi data atau dapat disebut dengan merangkum dengan memilih informasi pokok dan memusatkan pada hal-hal yang penting yang telah diperoleh dari observasi, wawancara, dokumen tertulis serta materi audio visual. data tersebut akan disesuaikan dengan pembahasan yang dikaitkan berdasarkan teori. Peneliti akan merangkum dan milih data yang sesuai dengan *collaborative governance* dan indikator keberhasilan dalam pengembangan Desa Wisata Kemetul.

2. Penyajian data

Dalam penelitian kualitatif ini penyajian data dengan teks yang bersifat naratif. Penyajian data ini akan dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, dan hubungan antar ketegori. Dengan demikian akan memudahkan peneliti untuk memahami dan merencanakan kegiatan selanjutnya berdasarkan data yang ada.

3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Kesimpulan awal yang telah dikemukakan yang telah didukung oleh bukti-bukti yang valid dan ada di lapangan maka kesimpulan tersebut kredibel. Penelitian kualitatif mungkin akan menjawab rumusan masalah sejak awal, namun mungkin juga tidak karena kesimpulan tersebut kaan berkembang di lapangan. Setelah pengumpulan dan penyajian data yang ada dilapangan, maka data tersebut akan dihubungkan untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Kesimpulan tersebut tentunya berhubungan dengan *collaborative governance* dalam pengembangan Desa Wisata Kemetul.

Dari ketiga komponen itu harus saling terkait satu sama lain, dimana langkah pertama ialah pengumpulan data wawancara dari lapangan. Dari banyaknya data yang diperoleh, diperlukan reduksi data. Selain itu pengumpulan data juga diperlukan untuk penyajian data yang kemudian ditarik kesimpulannya dari data yang telah diolah tersebut.

1.9.8 Kualitas Data

Terdapat dua hal utama yang dapat mempengaruhi kualitas data dari hasil penelitian (Sugiono, 2007) yaitu kualitas instrument penelitian dan kualitas pengumpulan data. Kualitas instrumen suatu penelitian berhubungan dengan bagaimana cara mengumpulkan data, segitu juga sebaliknya. Kualitas instrument penelitian yang dihasilkan memberikan data yang valid dan *realible*, maka hal tersebut tidak lepas dari kualitas pengumpulan data yang tepat. Begitu pula sebaliknya, apabila teknik pengumpulan data yang digunakan tidak tepat maka akan berpengaruh pada kualitas instrumen penelitian yang dihasilkan. Dalam penelitian ini pengumpulan data langsung menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi foto serta didukung dengan dokumen terkait, media massa dan studi pustaka yang berkaitan dengan *collabotarive governance* untuk mendukung penelitian.